



PETUNJUK PELAKSANAAN

MONITORING DAN EVALUASI LAYANAN
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2026



A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan sebuah dokumen yang sangat penting bagi perkembangan demokrasi di Indonesia, menjadi titik balik perubahan paradigma tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), yakni terwujudnya pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel dan adanya partisipasi masyarakat dalam berbagai proses perumusan kebijakan publik.

Keterbukaan dan akuntabilitas Badan Publik menjadi semakin penting untuk dilaksanakan dalam era globalisasi, karena masyarakat mempunyai hak untuk dapat memperoleh informasi seluas - luasnya, sebagaimana termaktub dalam UUD tahun 1945 pasal 28f.

Oleh karena itu, sebagai bentuk implementasi yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 72 Tahun 2025 Tentang Arah Kebijakan Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029, serta memperhatikan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741).

Bahwa untuk mengetahui dan mengukur pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana perlu dilakukan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai bahan evaluasi guna penyempurnaan kualitas pengelolaan layanan keterbukaan informasi publik.

Sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu untuk menyusun Petunjuk Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Layanan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2026.

B. Ketentuan Umum

Dalam petunjuk pelaksana ini yang dimaksud dengan:

1. Monitoring dan Evaluasi
 - a. Monitoring adalah kegiatan untuk memantau pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada PPID Pelaksana.
 - b. Evaluasi adalah kegiatan menilai pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada PPID Pelaksana.
2. *Self Assessment Questionnaire (SAQ)* atau Kuesioner Penilaian Mandiri adalah lembar kerja yang diisi secara mandiri oleh unit organisasi PPID pelaksana, berupa data atau dokumen tentang layanan keterbukaan informasi.
3. Pemenuhan data atau dokumen SAQ dilakukan dalam bentuk *link website* dan atau *link repositori kkp* yang dapat diakses secara terbuka.
4. Tim Penilai Monitoring dan Evaluasi adalah kelompok yang dibentuk untuk melakukan pemantauan dan memberikan penilaian atas pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Monitoring dan Evaluasi Layanan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan diperuntukkan bagi PPID Pelaksana: PPID Unit Eselon I dan PPID UPT.

D. Maksud dan tujuan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi ini adalah:

1. Mengukur tingkat kepatuhan PPID Pelaksana dalam pelaksanaan layanan keterbukaan Informasi Publik;
2. Mengidentifikasi, menginventarisasi, memberikan umpan balik, dan solusi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan layanan keterbukaan Informasi Publik; dan
3. Menjadikan bahan pengambilan kebijakan keterbukaan Informasi Publik.

E. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi ini adalah:

1. Tahapan Monitoring dan Evaluasi Layanan Keterbukaan Informasi Publik terdiri atas:
 - a. *Kick Off* Monitoring dan Evaluasi Layanan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan KKP;
 - b. Perencanaan dan penyusunan Kuesioner Monev;
 - c. *Sosialisasi* Monev Keterbukaan Informasi Publik di Lingkup KKP;
 - d. *Workshop* pengisian Monev Keterbukaan Informasi Publik
 - e. Pengisian lembar kuesioner penilaian mandiri atau SAQ
 - f. Periode Unggah Kuesioner;
 - g. Verifikasi Kuesioner dan data dukung SAQ;
 - h. Validasi hasil penilaian dan Sidang Pleno;
 - i. Masa Sanggah;
 - j. Pengumuman hasil penilaian SAQ
 - k. Seleksi kandidat PPID Pelaksana UPT Terbaik (Kategori Informatif) oleh PPID Eselon I;
 - l. Presentasi oleh PPID Pelaksana dan Pleno penilaian Uji Publik;
 - m. Penilaian Visitasi PPID Pelaksana;
 - n. Penetapan Hasil Pelaksanaan; dan
 - o. Pengumuman Hasil melalui Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik.
2. Aspek Penilaian terdiri atas 5 (lima) komponen indikator:
 - a. Mengumumkan Informasi Publik;
 - b. Menyediakan Dokumen Informasi Publik;
 - c. Sarana Prasarana;
 - d. Kelembagaan; dan
 - e. Digitalisasi.
3. Visitasi ke PPID Pelaksana dimaksudkan untuk melihat secara nyata sarana prasarana dan praktek pelaksanaan layanan keterbukaan informasi publik yang dilakukan secara uji petik/sampling pada PPID Pelaksana.

4. Tim Monitoring dan Evaluasi terdiri dari:
 - a. Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri selaku PPID Kementerian;
 - b. Biro Perencanaan sebagai unit organisasi di bidang perencanaan kinerja, anggaran dan monev;
 - c. Biro Hukum sebagai unit organisasi di bidang advokasi hukum;
 - d. Inspektorat Jenderal sebagai unit organisasi pembina dan pengawasan internal di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - e. Pusat Data, dan Informasi sebagai unit organisasi yang membidangi data statistik dan informasi, serta pelayanan publik;
 - f. PPID Pelaksana Unit organisasi Eselon I; dan
 - g. Pihak eksternal.
5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap:
 - a. PPID unit organisasi Eselon I; dan
 - b. PPID Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.
7. Bobot Penilaian Monitoring dan Evaluasi terdiri atas pengisian SAQ sebanyak 80 % dan Presentasi sebanyak 20%
 - a. Pengisian SAQ 80%
Bobot penilaian SAQ sebanyak 80% merupakan kompilasi dari beberapa aspek penilaian sebagai berikut:

No	Aspek Penilaian	Parameter	Nilai	Bobot Nilai
1.	Mengumumkan Informasi Publik	1. Penilaian terhadap kewajiban mengumumkan seluruh kategori informasi wajib berkala	15	60%
		2. Mengumumkan Informasi Tentang Profil Badan Publik		
		3. Mengumumkan Informasi Tentang Program dan/atau Kegiatan		
		4. Mengumumkan Informasi Keuangan		
		5. Mengumumkan Pengadaan		

		Barang dan Jasa		
		6. Daftar Informasi Publik		
		7. Daftar Informasi Dikecualikan		
2.	Menyediakan Dokumen Informasi Publik	1. Penilaian terhadap penguasaan dokumen yang memuat informasi publik tersedia setiap saat	25	
		2. Informasi Tersedia Setiap saat dan Pengadaan Barang dan Jasa		
		3. Menyediakan Dokumen informasi yang wajib disediakan dan atau diumumkan Tahun 2026 program dan kegiatan		
		4. Menyediakan dokumen Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukung		
3.	Sarana Prasarana	1. PPID terintegrasi dengan website utama menyediakan informasi:	25	
		2. Non Elektronik: Meja Layanan Informasi		
		3. Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas		
4.	Kelembagaan	1. Legilitas	25	
		2. Kepemimpinan		
		3. Dukungan Anggaran		
5.	Digitalisasi	1. Penyampaian informasi publik melalui media sosial (facebook, instagram,X, tiktok)	10	40%
		2. Pengembangan Layanan Publik		

b. Presentasi 20%

Presentasi melakukan penilaian terhadap inovasi dan strategi dengan bobot nilai 20% dengan aspek penilaian sebagai berikut:

- 1) Komitmen Organisasi
- 2) Inovasi dan Strategi

8. Parameter dan Pembobotan penilaian

Parameter penilaian SAQ Monev meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Kewajiban menyampaikan dan mengumumkan informasi wajib berkala, yaitu penilaian atas informasi wajib disediakan dan diumumkan secara berkala diukur dengan melihat ketersediaan informasi baik dalam bentuk data digital (*soft copy*) maupun non

- digital (upload *hard copy*) di laman website atau media penyampai informasi publik lainnya.
- b. Penguasaan PPID Pelaksana terhadap dokumen yang memuat informasi publik tersedia setiap saat, yaitu penilaian atas informasi tersedia setiap saat diukur dengan melihat jumlah ketersediaan dokumen baik data digital (soft copy) maupun non digital, semakin lengkap ketersediaan dokumen maka semakin baik akses publik.
 - c. Sarana Prasarana adalah sarana prasarana yang mendukung dan mempermudah dalam proses pelayanan informasi publik
 - d. Kelembagaan adalah penilaian terhadap kinerja PPID pada PPID Pelaksana Eselon 1 dan PPID Pelaksana UPT
 - e. Digitalisasi adalah proses penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, meningkatkan aksesibilitas, dan meningkatkan kualitas layanan informasi publik
 - f. Komitmen Organisasi adalah berkaitan dukungan terhadap keterbukaan informasi yang meliputi anggaran, Sumber Daya Manusia, regulasi dan tugas pokok dan fungsi
 - g. Inovasi dan Strategi, adalah pengembangan atau keterbaruan berbentuk digital dan non digital dan sebuah penciptaan ide, perencanaan terorganisir terkait strategi pengembangan keterbukaan informasi.
9. Kategori penilaian hasil monev diberikan dengan kualifikasi:
- a. Informatif dengan nilai 90 - 100;
 - b. Menuju Informatif dengan nilai 80 - 89,9;
 - c. Cukup Informatif dengan nilai 60 sampai dengan 79,9;
 - d. Kurang Informasi dengan nilai 40 sampai dengan 59,9; dan
 - e. Tidak Informatif dengan nilai kurang dari 39,9.

10. Timeline agenda kegiatan Monev:

No	Kegiatan	Tanggal
1	<i>Kick Off</i> Monev Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	12 Februari 2026
2	Perencanaan dan penyusunan Kuesioner Monev	6 Mei 2026
4	<i>Sosialisasi</i> Monev Keterbukaan Informasi Publik Lingkup KKP	25 Mei 2026
5	<i>Workshop</i> Pengisian Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	10 – 11 Juni 2026
6	Pengisian lembar kuesioner penilaian mandiri atau SAQ	10 Juni – 5 Juli 2026
7	Periode Unggah Kuesioner	10 Juni – 5 Juli 2026
8	Verifikasi Kuesioner dan data dukung SAQ	6 – 14 Juli 2026
9	Validasi hasil penilaian dan Sidang Pleno	27 – 29 Juli 2026
10	Masa Sanggah	3 – 7 Agustus 2026
11	Pengumuman hasil penilaian SAQ	20 Agustus 2026
12	Seleksi kandidat PPID Pelaksana UPT Terbaik (Kategori Informatif) oleh PPID Eselon I	20 – 31 Agustus 2025
13	Presentasi oleh PPID Pelaksana	September 2026
14	Pleno penilaian Uji Publik	September 2026
15	Penilaian Visitasi PPID Pelaksana	Oktober 2026
16	Penetapan Hasil Pelaksanaan	November 2026
17	Pengumuman Hasil melalui Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik	November/Desember 2026

F. Sasaran Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Layanan Informasi Publik

Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Layanan Keterbukaan Informasi Publik dilakukan terhadap PPID Pelaksana Pusat dan UPT di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

G. Penyeragaman Informasi pada Menu Website

Dalam era Keterbukaan Informasi sebagai amanat dari regulasi bahwa website e-PPID merupakan pintu utama dalam pelayanan informasi publik. Menu e-PPID yang ada dalam website PPID Pelaksana menjadi perhatian utama untuk dapat diseragamkan seluruh PPID Pelaksana Pusat dan UPT, dengan menu memuat:

1. Menu Profil PPID;
2. Struktur PPID;
3. Maklumat Pelayanan;
4. Daftar Informasi Publik;
 - a. Informasi secara Berkala;
 - b. Informasi tersedia setiap saat;
 - c. Informasi serta merta.
5. Mekanisme, memuat:
 - a. permohonan informasi;
 - b. pengajuan keberatan informasi;
 - c. pengujian konsekuensi;
 - d. pengklasifikasikan informasi;
 - e. pendokumentasian informasi.
6. Standar Operasional Prosedur (SOP) memuat:
 - a. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi;
 - b. SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi;
 - c. SOP Pendokumentasian Informasi Publik;
 - d. SOP Pendokumentasian informasi yang dikecualikan;
 - e. SOP Penanganan Sengketa;
 - f. SOP Uji Konsekuensi;
 - g. SOP Pemutakhiran Data Informasi Publik.
7. Regulasi;

8. Laporan PPID memuat: Laporan Semester dan Laporan Tahunan;
9. Data Statistik Layanan Informasi;
10. Survey Kepuasan Masyarakat.

Petunjuk Pelaksanaan ini sebagai acuan untuk dilaksanakan oleh PPID Kementerian dan PPID Pelaksana unit organisasi eselon I Pusat dan UPT dalam menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi Layanan keterbukaan informasi publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2026.

Jakarta, 18 Mei 2026

Plt. Kepala Biro Hubungan Masyarakat
dan Kerja Sama Luar Negeri
selaku Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Kementerian



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Aulia Riza Farhan

Lampiran I. Daftar PPID Pelaksana Unit Eselon I KKP

DAFTAR PPID PELAKSANA UNIT ESELON I KKP

- A. Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut
 - 1. Sekretariat Jenderal Penataan Ruang Laut
- B. Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan
 - 2. Sekretariat Jenderal Pengelolaan Kelautan
- C. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
 - 3. Sekretariat Jenderal Perikanan Tangkap
- D. Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya
 - 4. Sekretariat Jenderal Perikanan Budi Daya
- E. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
 - 5. Sekretariat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
- F. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
 - 6. Sekretariat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
- G. Inspektorat Jenderal
 - 7. Sekretariat Inspektorat Jenderal
- H. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
 - 8. Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
- I. Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
 - 9. Sekretariat Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Lampiran II. Daftar PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT)

DAFTAR PPID PELAKSANA UPT KKP

- A. Sekretariat Jenderal
 - 1. Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
- B. PPID Direktorat Jenderal Jenderal Penataan Ruang Laut
 - 2. Balai Penataan Ruang Laut Makassar
 - 3. Balai Penataan Ruang Laut Padang
 - 4. Loka Penataan Ruang Laut Serang
 - 5. Loka Penataan Ruang Laut Sorong
- C. PPID Direktorat Jenderal Jenderal Pengelolaan Kelautan
 - 6. Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak
 - 7. Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar
 - 8. Balai Pengelolaan Kelautan Kupang
 - 9. Loka Pengelolaan Kelautan Pekanbaru
- D. PPID Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
 - 10. Balai Besar Penangkapan Ikan Semarang
 - 11. Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan
 - 12. Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus
 - 13. Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman
 - 14. Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
 - 15. Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari
 - 16. Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung
 - 17. Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga
 - 18. Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan
 - 19. Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat
 - 20. Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu
 - 21. Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu
 - 22. Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan
 - 23. Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan
 - 24. Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi
 - 25. Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong
 - 26. Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat
 - 27. Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan
 - 28. Pelabuhan Perikanan Nusantara Kwandang
 - 29. Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon
 - 30. Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate
 - 31. Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual
 - 32. Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang
- E. PPID Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya
 - 33. Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara
 - 34. Balai Besar Perikanan Budidaya Air Laut Lampung
 - 35. Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi
 - 36. Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo

37. Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam
 38. Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar
 39. Balai Perikanan Budidaya Laut Batam
 40. Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok
 41. Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon
 42. Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee
 43. Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu
 44. Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin
 45. Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang
 46. Balai Produksi Induk Unggul dan Kekekangan Karangasem
 47. Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan, Serang
- F. PPID Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
48. Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan
- G. PPID Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
49. Pangkalan PSDKP Lampulo
 50. Pangkalan PSDKP Batam
 51. Pangkalan PSDKP Jakarta
 52. Pangkalan PSDKP Benoa
 53. Pangkalan PSDKP Bitung
 54. Pangkalan PSDKP Tual
 55. Stasiun PSDKP Cilacap
 56. Stasiun PSDKP Belawan
 57. Stasiun PSDKP Kupang
 58. Stasiun PSDKP Pontianak
 59. Stasiun PSDKP Tarakan
 60. Stasiun PSDKP Tahuna
 61. Stasiun PSDKP Ambon
 62. Stasiun PSDKP Biak
- H. PPID Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP)
63. Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
 64. Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan
 65. Balai Riset Pemuliaan Ikan
 66. Balai Riset Budidaya Ikan Hias
 67. Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan
 68. Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan
 69. Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan
 70. Balai Riset Perikanan Laut
 71. Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan
 72. Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir

73. Loka Riset Budidaya Rumput Laut
 74. Loka Riset Perikanan Tuna
 75. Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan
 76. Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan
 77. Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi
 78. Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan
 79. Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon
 80. Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung
 81. Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal
 82. Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kelautan dan Perikanan
 83. Politeknik Ahli Usaha Perikanan
 84. Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo
 85. Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung
 86. Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong
 87. Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai
 88. Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran
 89. Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana
 90. Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang
 91. Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone
 92. Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang
 93. Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi
 94. Sekolah Usaha Perikanan Menengah Pariaman
 95. Sekolah Usaha Perikanan Menengah Ladong
 96. Sekolah Usaha Perikanan Menengah Tegal
 97. Sekolah Usaha Perikanan Menengah Ambon
 98. Sekolah Usaha Perikanan Menengah Kotaagung
- I. PPID Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP)
99. Balai Besar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Surabaya I
 100. Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Medan I
 101. Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tanjung Pinang
 102. Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Lampung
 103. Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Jakarta
 104. Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Semarang
 105. Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Surabaya II
 106. Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Entikong
 107. Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Balikpapan
 108. Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan

Perikanan Banjarbaru

109. Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tarakan
110. Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Denpasar
111. Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Mataram
112. Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Makassar
113. Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado
114. Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ambon
115. Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Jayapura
116. Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Banda Aceh
117. Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Medan II
118. Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tanjung Balai Asahan
119. Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Padang
120. Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pekanbaru
121. Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Jambi
122. Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Palembang
123. Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bengkulu
124. Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pangkalpinang
125. Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Batam
126. Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merak
127. Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bandung
128. Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Cirebon
129. Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Yogyakarta
130. Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pontianak
131. Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Palangkaraya

132. Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Kupang
133. Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bima
134. Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Mamuju
135. Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Palu
136. Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Luwuk Banggai
137. Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Kendari
138. Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Baubau
139. Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Gorontalo
140. Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tahuna
141. Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ternate
142. Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sorong
143. Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merauke
144. Balai Uji Standar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Jakarta

Jakarta, 18 Mei 2026
Plt. Kepala Biro Hubungan Masyarakat
dan Kerja Sama Luar Negeri
selaku Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Kementerian



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Aulia Riza Farhan

SAQ MONEV KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK LINGKUP KKP

I MENGUMUMKAN INFORMASI PUBLIK (15)			BOBOT
A	Informasi tentang profil unit organisasi		
	1	Mengumumkan informasi deskripsi tugas dan fungsi dalam Website KKP unit organisasi eselon 1 dan atau UPT bersangkutan yang terbaru	A = 1 B = 0.5 C = 0
	2	Mengumumkan LHKPN Pejabat Negara yang telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam website (bukan dalam bentuk link KPK) yang terdiri dari Pimpinan unit eselon 1 dan pimpinan UPT yang terbaru	A = 1 B = 0.5 C = 0
	3	Mengumumkan informasi jumlah dan prosentase yang wajib LHKSN dalam lingkup unit kerja eselon 1 dan atau UPT yang terbaru (2025)	A = 0.5 B = 0.3 C = 0
B	Informasi tentang program dan/atau kegiatan unit organisasi sesuai PermenKP No 42 Tahun 2023.		
	1	Mengumumkan program-program atau kegiatan Tahun 2026 unit organisasi eselon 1 (bagi PPID Pelaksana Pusat) dan unit organisasi UPT (bagi PPID Pelaksana UPT) yang diumumkan di website yang memuat: nama program/kegiatan, penanggungjawab/pelaksana kegiatan dilengkapi target dan capaian, jadwal pelaksanaan, dan sumber anggaran serta besaran anggaran.	A = 1 B = 0.5 C = 0
	2	Mengumumkan program-program atau kegiatan Tahun 2025 unit organisasi eselon 1 (bagi PPID Pelaksana Pusat) dan unit organisasi UPT (bagi PPID Pelaksana UPT) yang diumumkan di website yang memuat: nama program/kegiatan, penanggungjawab/pelaksana kegiatan dilengkapi target dan capaian, jadwal pelaksanaan dan sumber anggaran serta besaran anggaran.	A = 0.5 B = 0.3 C = 0
	3	Mengumumkan informasi realisasi kegiatan beserta capain kinerja unit organisasi eselon 1 (bagi PPID Pelaksana Pusat) dan unit organisasi UPT (bagi PPID Pelaksana UPT)	A = 0.5 B = 0.3 C = 0
C	Informasi Keuangan		
	1	Mengumumkan pada website KKP informasi Laporan Keuangan Tahun 2025 yang telah diaudit sesuai PermenKP No.42 Tahun 2023 yang terdiri dari:	
		1.1 Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (RLA)	A = 0.5 B = 0.3 C = 0
		1.2 Neraca	A = 0.5 B = 0.3 C = 0
		1.3 Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)	A = 0.5 B = 0.3 C = 0
		1.4 Daftar Aset dan Investasi	A = 0.5 B = 0.3 C = 0
	2	Mengumumkan dalam website KKP terkait informasi keuangan Tahun 2026 dalam bentuk:	
		2.1 DIPA	A = 0.5 B = 0.3 C = 0
		2.2 RKA-KL	A = 0.5 B = 0.3 C = 0
	3	Informasi realisasi atau penyerapan penggunaan keuangan Eselon 1 /UPT pada semester 1 Tahun 2026	A = 0.5 B = 0.3 C = 0
D	Pengadaan Barang dan Jasa (Melalui Tender atau Penunjukan Langsung)		

	1	Mengumumkan informasi rencana umum pengadaan sesuai tugas dan fungsi Unit Kerja Eselon 1/UPT sebagaimana tercantum dalam SIRUP .	A = 1 B = 0.5 C = 0
	2	Sebutkan dua pengumuman paket tertinggi pengadaan barang dan jasa Tahun 2026 sesuai program atau kegiatan konstruksi atau non-konstruksi sebagaimana tercantum dalam LPSE lpse.kkp.go.id yang sudah diganti menjadi https://spse.inaproc.id/kkp (yang telah selesai tender atau yang sedang berjalan)	
	2.1	Paket 1	A = 1 B = 0.5 C = 0
	2.2	Paket 2	A = 1 B = 0.5 C = 0
	3	Sebutkan dua pengumuman paket tertinggi pengadaan barang dan jasa Tahun 2026 sesuai program atau kegiatan konstruksi atau non-konstruksi tidak termasuk jasa perorangan sebagaimana tercantum dalam lpse.kkp.go.id yang sudah diganti menjadi https://spse.inaproc.id/kkp dengan status tahap tender (tender belum selesai), tender ulang atau tender gagal	
	3.1	Paket 1	A = 1 B = 0.5 C = 0
	3.2	Paket 2	A = 1 B = 0.5 C = 0
E	Informasi Terkait Daftar Informasi Publik Sesuai Fungsi Utama Unit Organisasi Eselon I dan UPT		
	1	Unit Organisasi Eselon 1 (bagi PPID Pelaksana Pusat) dan unit organisasi UPT (bagi PPID Pelaksana UPT) menyediakan dan mengumumkan dan menetapkan informasi yang dikuasai Tahun 2026 dalam Daftar Informasi Publik (DIP), sesuai standar Perki 1 Tahun 2021.	A = 1 B = 0.5 C = 0
F	Informasi Dikecualikan Sesuai Fungsi Utama Unit Organisasi Eselon 1/ UPT		
	1	Unit Organisasi Eselon 1 (bagi PPID Pelaksana Pusat) dan unit organisasi UPT (bagi PPID Pelaksana UPT) menyediakan dan mengumumkan Informasi Dikecualikan Tahun 2026 berdasarkan hasil Uji Konsekuensi sesuai Perki 1 Tahun 2021 Tentang SLIP	A = 1 B = 0.5 C = 0
II	MENYEDIKAKAN DOKUMEN INFORMASI (25)		
A	Menyediakan Dokumen informasi yang wajib disediakan dan atau diumumkan Tahun 2026 program dan kegiatan meliputi:		
	1	Dokumen program-program atau kegiatan Tahun 2026 Unit Organisasi Eselon 1/UPT sesuai dengan tugas dan fungsi yang sekurang-kurangnya memuat nama program/kegiatan, sumber anggaran, besaran anggaran.	A = 1 B = 0.5 C = 0
	2	Dokumen laporan keuangan hasil audit Tahun 2025 lengkap terdiri dari CALK, LRA, Neraca dan Daftar Aset dan Investasi	A = 1 B = 0.5 C = 0
	3	Dokumen keuangan tahun 2026 dalam bentuk DIPA dan RKA-KL	A = 1 B = 0.5 C = 0
	4	Menyediakan dokumen pengadaan barang dan jasa yang telah diumumkan, rencana, selesai tender atau penunjukan langsung dan telah serah terima pekerjaan Tahun 2026, meliputi:	
	4.1	Kerangka Acuan Kerja (KAK);	A = 0.5 B = 0.3 C = 0
	4.2	Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS;	A = 0.5 B = 0.3 C = 0
	4.3	Spesifikasi Teknis;	A = 0.5 B = 0.3 C = 0
	4.4	Rancangan Kontrak;	A = 0.5 B = 0.3 C = 0
	4.5	Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi;	A = 0.5 B = 0.3 C = 0

			4.6	Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan;	A = 0.5 B = 0.3 C = 0
			4.7	Daftar Kuantitas dan Harga;	A = 0.5 B = 0.3 C = 0
			4.8	Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan;	A = 0.5 B = 0.3 C = 0
			4.9	Gambar Rancangan Pekerjaan;	A = 0.5 B = 0.3 C = 0
			4.10	Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;	A = 0.5 B = 0.3 C = 0
			4.11	Dokumen Penawaran Administratif;	A = 0.5 B = 0.3 C = 0
			4.12	Surat Penawaran Penyedia;	A = 0.5 B = 0.3 C = 0
			4.13	Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;	A = 0.5 B = 0.3 C = 0
			4.14	Berita Acara Pemberian Penjelasan;	A = 0.5 B = 0.3 C = 0
			4.15	Berita Acara Pengumuman Negosiasi;	A = 0.5 B = 0.3 C = 0
			4.16	Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding;	A = 0.5 B = 0.3 C = 0
			4.17	Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia;	A = 0.5 B = 0.3 C = 0
			4.18	Laporan Hasil Pemilihan Penyedia;	A = 0.5 B = 0.3 C = 0
			4.19	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);	A = 0.5 B = 0.3 C = 0
			4.20	Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta Perubahan Kontrak yang tidak mengandung informasi yang dikecualikan;	A = 0.5 B = 0.3 C = 0
			4.21	Surat Perintah Mulai Kerja;	A = 0.5 B = 0.3 C = 0
			4.22	Surat Jaminan Pelaksanaan;	A = 0.5 B = 0.3 C = 0
			4.23	Surat Jaminan Uang Muka;	A = 0.5 B = 0.3 C = 0
			4.24	Surat Jaminan Pemeliharaan;	A = 0.5 B = 0.3 C = 0
			4.25	Surat Tagihan;	A = 0.5 B = 0.3 C = 0
			4.26	Surat Pesanan E-purchasing;	A = 0.5 B = 0.3 C = 0

		4.27	Surat Perintah Membayar;	A = 0.5 B = 0.3 C = 0
		4.28	Surat Perintah Pencairan Dana;	A = 0.5 B = 0.3 C = 0
		4.29	Laporan Pelaksanaan Pekerjaan;	A = 0.5 B = 0.3 C = 0
		4.30	Laporan Penyelesaian Pekerjaan;	A = 0.5 B = 0.3 C = 0
		4.31	Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;	A = 0.5 B = 0.3 C = 0
		4.32	Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over	A = 0.5 B = 0.3 C = 0
	B	Menyediakan dokumen Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;		
		1	Dokumen Kerjasama/Kemitraan Tahun 2025 - 2026	A = 0.5 B = 0.3 C = 0
		2	Dokumen Perjanjian Swakelola Tahun 2025 - 2026	A = 0.5 B = 0.3 C = 0
	C	Menyediakan dokumen informasi setiap saat		
		1	Menyediakan dokumen Surat menyurat pimpinan atau pejabat Unit Organisasi Eselon 1/UPT dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya 2025 - 2026; (sediakan daftarnya dan ambil sampling 2 dokumen setiap tahunnya)	A = 0.5 B = 0.3 C = 0
		2	Menyediakan dokumen kepegawaian meliputi: Jumlah pegawai, jenis kelamin, sebaran pegawai, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal kepegawaian 2025 - 2026.	A = 0.5 B = 0.3 C = 0
		3	Menyediakan dokumen pengaduan masyarakat: jumlah pengaduan, jenis, dan gambaran umum Pengaduan, serta laporan penindakannya 2025 - 2026.	A = 0.5 B = 0.3 C = 0
		4	Mengumumkan Data laporan akses Informasi Publik Tahun 2025 (laporan Tahunan) dan tahun 2026 (Semester I)	A = 1 B = 0.5 C = 0
		5	Jumlah Permintaan Informasi Publik: Waktu yang diperlukan, Jumlah Permintaan yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permintaan yang ditolak, disertakan alasan penolakan (bila ada).	A = 0.5 B = 0.3 C = 0
		6	Daftar Informasi Publik Tersedia Setiap Saat Tahun 2025 - 2026 (baik Digital dan non-Digital) sesuai PermenKP No.42 Tahun 2023. Minimal 20 Dokumen.	A = 2 B = 1 C = 0
III SARANA PRASARANA (25)				
	A	Menu PPID terintegrasi dengan website utama menyediakan informasi:		
		1	Informasi Wajib Berkala yang diperbaharui minimal 6 bulan sekali sesuai PermenKP No.42 Tahun 2023, meliputi:	
		1.1	Informasi tentang profil Unit Organisasi;	A = 0.2 B = 0.1 C = 0
		1.2	Ringkasan Informasi tentang program dan kegiatan sedang dijalankan;	A = 0.2 B = 0.1 C = 0
		1.3	Ringkasan Informasi tentang kinerja capaian dalam lingkup Unit organisasinya;	A = 0.2 B = 0.1 C = 0
		1.4	Ringkasan laporan keuangan telah diaudit;	A = 0.2 B = 0.1 C = 0
		1.5	Ringkasan laporan akses Informasi Publik;	A = 0.2 B = 0.1 C = 0

		1.6	Informasi tentang peraturan, keputusan, kebijakan;	A = 0.2 B = 0.1 C = 0
		1.7	Informasi tentang prosedur memperoleh Informasi Publik;	A = 0.2 B = 0.1 C = 0
		1.8	Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan pejabat jajaran di organisasi;	A = 0.2 B = 0.1 C = 0
		1.9	Informasi tentang pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;	A = 0.2 B = 0.1 C = 0
		1.10	Informasi tentang kepegawaian; dan	A = 0.2 B = 0.1 C = 0
		1.11	Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di lingkungan unit organisasinya.	A = 0.2 B = 0.1 C = 0
	2	Informasi Tersedia Setiap Saat sesuai PermenKP No.42 Tahun 2023 Tahun 2026, meliputi:		A = 0.2 B = 0.1 C = 0
		2.1	Daftar Informasi Publik;	A = 0.3 B = 0.15 C = 0
		2.2	Informasi tentang peraturan, keputusan, dan kebijakan Unit organisasinya;	A = 0.3 B = 0.15 C = 0
		2.3	Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan;	A = 0.3 B = 0.15 C = 0
		2.4	Dokumen perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;	A = 0.3 B = 0.15 C = 0
		2.5	Surat menyurat pimpinan atau pejabat Kementerian dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya;	A = 0.2 B = 0.1 C = 0
		2.6	Persyaratan perizinan, perizinan yang diterbitkan oleh unit organisasinya;	A = 0.2 B = 0.1 C = 0
		2.7	Data perbendaharaan atau inventaris;	A = 0.2 B = 0.1 C = 0
		2.8	Rencana strategis dan rencana kerja unit organisasinya;	A = 0.2 B = 0.1 C = 0
		2.9	Agenda kerja pimpinan satuan kerja;	A = 0.2 B = 0.1 C = 0
		2.10	Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik;	A = 0.2 B = 0.1 C = 0
		2.11	Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran; yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya;	A = 0.2 B = 0.1 C = 0
		2.12	Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya	A = 0.2 B = 0.1 C = 0
		2.13	Peraturan perundang-undangan yang telah disahkan beserta kajian akademik;	A = 0.2 B = 0.1 C = 0
		2.14	Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat unit organisasinya dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;	A = 0.2 B = 0.1 C = 0

		2.15	Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan masa berlaku atau uji konsekuensi;	A = 0.2 B = 0.1 C = 0
		2.16	Informasi tentang standar layanan Informasi.	A = 0.2 B = 0.1 C = 0
		3	Informasi Serta Merta, sesuai PermenKP No.42 Tahun 2023, meliputi:	
		3.1	Informasi bencana alam	A = 0.3 B = 0.15 C = 0
		3.2	Informasi jenis ikan invasif yang mengancam keberadaan ikan lokal;	A = 0.3 B = 0.15 C = 0
		3.3	Informasi daerah wabah penyakit ikan.	A = 0.3 B = 0.15 C = 0
		3.4	Isu global yang mempengaruhi kebijakan di bidang kelautan dan perikanan (contoh: kebijakan tarif, produk kelautan dan perikanan yang di dilarang keluar atau masuk dari dan ke negara lain, produk kelautan dan perikanan yang berbahaya)	A = 0.3 B = 0.15 C = 0
		4	Daftar Informasi Dikecualikan	A = 0.5 B = 0.3 C = 0
		5	Daftar Informasi Publik online	A = 0.5 B = 0.3 C = 0
		6	Permintaan informasi online (bukan mengunduh formulir permohonan)	A = 0.3 B = 0.15 C = 0
		7	Pengajuan keberatan online (bukan mengunduh formulir pengajuan keberatan)	A = 0.3 B = 0.15 C = 0
		8	Menyediakan audio visual yang menayangkan layanan informasi publik/papan informasi elektronik/lainnya	A = 0.5 B = 0.3 C = 0
	B	Meja Layanan Informasi		
		1	Ruang Layanan Informasi/PPID	A = 5 B = 3 C = 0
		2	Formulir Permintaan Informasi dan pengajuan keberatan informasi	A = 1 B = 0.5 C = 0
		3	Sarana Pendukung Lainnya	A = 1 B = 0.5 C = 0
		4	Maklumat Pelayanan yang sudah dimutakhirkan (Tahun 2026) (Terbaru dan ditandatangani)	A = 1.5 B = 0.75 C = 0
		5	Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2026	A = 1 B = 0.5 C = 0
		6	SOP layanan Keterbukaan Informasi Publik pada PPID Pelaksana Pusat, maupun di PPID Pelaksana UPT Yang Dipajang di Ruang PPID, meliputi:	
		6.1	SOP Permintaan IP Online/Offline;	A = 0.4 B = 0.2 C = 0
		6.2	SOP Pengajuan Keberatan;	A = 0.3 B = 0.15 C = 0
		7	SOP layanan Keterbukaan Informasi Publik pada PPID Pelaksana Pusat, maupun di PPID Pelaksana UPT yang tersedia di Ruang PPID meliputi:	

		7.1	SOP Pendokumentasian informasi publik;	A = 0.3 B = 0.15 C = 0
		7.2	SOP Pengujian Konsekuensi;	A = 0.3 B = 0.15 C = 0
		7.3	SOP Penetapan dan Pemutakhiran Informasi Publik.	A = 0.3 B = 0.15 C = 0
		8	Kecakapan petugas Layanan Informasi Publik	A = 0.3 B = 0.15 C = 0
	C	Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas		
		1	Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Online (elektronik/digital)	A = 2 B = 1 C = 0
		2	Aksesibilitas Penyandang Disabilitas - Offline	A = 2 B = 1 C = 0
IV KELEMBAGAAN (25)				
	A	Legalitas PPID Pelaksanaan (Pusat/UPT)		
		1	Sesuai PermenKP No.42 Tahun 2023 Menyediakan dan mengumumkan informasi profil PPID yang meliputi:	
		1.1	Informasi domisili/alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi;	A = 1 B = 0.5 C = 0
		1.2	Sumber Anggaran;	A = 2 B = 1 C = 0
		1.3	LHKPN yang diverifikasi.	A = 1 B = 0.5 C = 0
		1.4	Profil singkat pejabat	A = 1 B = 0.5 C = 0
		1.5	Struktur Kelembagaan,	A = 1 B = 0.5 C = 0
		1.6	visi Misi	A = 1 B = 0.5 C = 0
		1.7	SK Petugas PPID	A = 1 B = 0.5 C = 0
		1.8	Maklumat	A = 1 B = 0.5 C = 0
		2	Menyediakan dan mengumumkan standar pelayanan informasi publik yang terdiri dari:	
		2.1	SOP Permintaan Informasi Publik Online/Offline	A = 1 B = 0.5 C = 0
		2.2	SOP Pengajuan Keberatan	A = 1 B = 0.5 C = 0
		2.3	SOP Uji Konsekuensi (Daftar Informasi Dikecualikan-DIK)	A = 1 B = 0.5 C = 0
		2.4	SOP Penetapan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP)	A = 1 B = 0.5 C = 0
		2.5	SOP Pendokumentasian informasi publik	A = 1 B = 0.5 C = 0

	B	Kepemimpinan	
		1	Menetapkan kebijakan pembinaan pelayanan informasi publik A = 1 B = 0.5 C = 0
		2	Menetapkan penandatanganan komitmen bersama dengan jajaran PPID Pelaksana UPT bagi PPID Pelaksana Pusat, dan Penandatanganan Komitmen Bersama Internal bagi PPID Pelaksana UPT. A = 1 B = 0.5 C = 0
		3	Melakukan Peningkatan kapasitas Petugas layanan Informasi Publik di Unit Organisasi PPID Pelaksana Pusat maupun UPT A = 1 B = 0.5 C = 0
		4	Melakukan monitoring dan evaluasi internal atas pelaksanaan pembinaan kebijakan layanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana UPT dan/atau Tim/Petugas Layanan Informasi Publik yang dibuktikan dengan hasil monev atau hasil pembinaan A = 5 B = 2 C = 0
	C	Dukungan Anggaran	
		1	Menyediakan anggaran rutin kegiatan Layanan keterbukaan informasi A = 3 B = 1 C = 0
V	DIGITALISASI (10)		
	A	Penyampaian informasi publik melalui media sosial (facebook, instagram, X, tiktok)	
		1	Mengumumkan Informasi berkaitan ruang lingkup, tugas dan fungsi Unit organisasi Eselon I bagi PPID Pelaksana Pusat, dan Ruang lingkup, tugas dan fungsi internal UPT bagi PPID Pelaksana UPT. A = 1 B = 0.5 C = 0
		2	Mengumumkan Informasi program dan kegiatan 2026 Unit organisasi Eselon I dalam Medsos PPID Pelaksana Pusat dan UPT A = 2 B = 1 C = 0
		3	Mengumumkan informasi DIPA atau RKA K/L Tahun Anggaran 2026 A = 2 B = 1 C = 0
		4	Mengumumkan alur Permintaan Informasi Publik sesuai mekanisme di PPID Pelaksana Pusat maupun UPT. A = 1 B = 0.5 C = 0
		5	Mengumumkan Informasi berkaitan alasan yang dapat digunakan Pemohon Informasi mengajukan keberatan (Sesuai PermenKP No.42 Tahun 2023). Tidak lengkap menghilangkan nilai nomor ini. A = 1 B = 0.5 C = 0
	B	Pengembangan Layanan Informasi Publik	
		1	Pemanfaatan teknologi informasi atau inovasi non-digital untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Unit Organisasi PPID Pelaksana Pusat maupun UPT A = 3 B = 1.5 C = 0

**KUISIONER MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2026**

MENGUMUMKAN INFORMASI PUBLIK

INFORMASI WAJIB BERKALA							
INFORMASI TERKAIT TUGAS DAN FUNGSI UTAMA UNIT ORGANISASI ESELON 1 DAN UPT			TERSEDIA		BUKTI PELAKSANAAN	LINK DOKUMEN	
			Ya	Tidak			
I	MENGUMUMKAN INFORMASI PUBLIK					Web Profil UPT	
	A	Informasi tentang profil unit organisasi					
		1	Mengumumkan informasi deskripsi tugas dan fungsi dalam website Unit Organisasi eselon 1 dan atau UPT bersangkutan yang terbaru	Ya		Alamat link website KKP dan tangkapan layar unit organisasi eselon 1/UPT yang memuat deskripsi tugas dan fungsi (bukan dari website PPID)	
		2	Mengumumkan LHKPN Pejabat Negara yang telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam website (bukan dalam bentuk link KPK) yang terdiri dari Pimpinan unit eselon 1 dan pimpinan UPT yang terbaru	Ya		LHKPN Tahun terakhir Pimpinan unit eselon 1 (Sekjen/Dirjen/Irjen/Kepala Badan), dan eselon 2 (Sesditjen/SesBadan/Sesitjen, para Direktur, para kepala pusat) atau pimpinan UPT dan pegawai (bendahara) yang wajib LHKPN (Link website PPID dan tangkapan layar)	
		3	Mengumumkan informasi jumlah dan prosentase yang wajib LHKASN dalam lingkup unit kerja eselon 1 dan atau UPT yang terbaru (2025)	Ya		Link website PPID terkait LHKASN	
	B	Informasi tentang program dan/atau kegiatan unit organisasi sesuai PermenKP No 42 Tahun 2023.					
		1	Mengumumkan program-program atau kegiatan Tahun 2026 unit organisasi eselon 1 (bagi PPID Pelaksana Pusat) dan unit organisasi UPT (bagi PPID Pelaksana UPT) yang diumumkan di website yang memuat: nama program/kegiatan; penanggungjawab/pelaksana kegiatan dilengkapi target dan capaian; jadwal pelaksanaan; dan sumber anggaran serta besaran anggaran.	Ya		Alamat link website PPID dan tangkapan layar yang menyajikan informasi terkait program kegiatan yang akan dilaksanakan dan sedang dilaksanakan (LKJ,Rencana Aksi, Renstra 2026 eselon 1)	
		2	Mengumumkan program-program atau kegiatan Tahun 2025 unit organisasi eselon 1 (bagi PPID Pelaksana Pusat) dan unit organisasi UPT (bagi PPID Pelaksana UPT) yang diumumkan di website yang memuat: nama program/kegiatan; penanggungjawab/pelaksana kegiatan dilengkapi target dan capaian; jadwal pelaksanaan; dan sumber anggaran serta besaran anggaran.	Ya		Alamat link website PPID dan tangkapan layar yang menyajikan informasi program/kegiatan yang sudah dilaksanakan, (Laporan Kinerja Tahun 2025)	
		3	Mengumumkan informasi realisasi kegiatan beserta capain kinerja unit organisasi eselon 1 (bagi PPID Pelaksana Pusat) dan unit organisasi UPT (bagi PPID Pelaksana UPT)	Ya		Alamat link website PPID dan tangkapan layar yang menyajikan informasi program/kegiatan yang SEDANG dilaksanakan tahun 2026.	
	C	Informasi Keuangan					
		1	Mengumumkan pada website KKP informasi Laporan Keuangan Tahun 2025 yang telah diaudit sesuai PermenKP No.42 Tahun 2023 yang terdiri dari:				
		1.1	Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (RLA)			Alamat link website PPID dan tangkapan layar yang menyajikan informasi terkait materi kuesioner	
		1.2	Neraca			Alamat link website PPID dan tangkapan layar yang menyajikan informasi terkait materi kuesioner	
		1.3	Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)			Alamat link website PPID dan tangkapan layar yang menyajikan informasi terkait materi kuesioner	
		1.4	Daftar Aset dan Investasi			Alamat link website PPID dan tangkapan layar yang menyajikan informasi terkait materi kuesioner	
		2	Mengumumkan dalam website KKP terkait informasi keuangan Tahun 2026 dalam bentuk:				
		2.1	DIPA			Alamat link website dan tangkapan layar yang menyajikan informasi terkait materi kuesioner (DIPA AWAL)	
		2.2	RKA-KL			Alamat link website dan tangkapan layar yang menyajikan informasi terkait materi kuesioner (RKA-KL AWAL)	
		3	Informasi realisasi atau penyerapan penggunaan keuangan Eselon 1/UPT pada semester 1 Tahun 2026			Alamat link website dan tangkapan layar yang menyajikan informasi terkait materi kuesioner	

D Pengadaan Barang dan Jasa (Melalui Tender atau Penunjukan Langsung)						
	1		Mengumumkan informasi rencana umum pengadaan sesuai tugas dan fungsi Unit Kerja Eselon 1/UPT sebagaimana tercantum dalam SIRUP .			Alamat link https://sirup.inaproc.id/sirup/loginctr/index dan tangkapan layar menyajikan informasi terkait materi kuesioner disertai Soft file Daftar Paket (sertakan tautan link)
	2		Sebutkan dua pengumuman paket tertinggi pengadaan barang dan jasa Tahun 2026 sesuai program atau kegiatan konstruksi atau non-konstruksi sebagaimana tercantum dalam LPSE lpse.kkp.go.id yang sudah diganti menjadi https://spse.inaproc.id/kkp (yang telah selesai tender atau yang sedang berjalan)			Alamat link https://spse.inaproc.id/kkp dan tangkapan layar yang menyajikan informasi terkait materi kuesioner disertai Soft file Daftar Paket (sertakan tautan link)
	2.1	Paket 1				Alamat link LPSE dan tangkapan layar yang memuat informasi tender telah selesai (Bagi yang tidak ada tender lampirkan surat pernyataan TTD Ses Eselon I/Kepala UPT)
	2.2	Paket 2				Alamat link LPSE dan tangkapan layar yang memuat informasi tender telah selesai (Bagi yang tidak ada tender lampirkan surat pernyataan TTD Ses Eselon I/Kepala UPT)
	3		Sebutkan dua pengumuman paket tertinggi pengadaan barang dan jasa Tahun 2026 sesuai program atau kegiatan konstruksi atau non-konstruksi tidak termasuk jasa perorangan sebagaimana tercantum dalam lpse.kkp.go.id yang sudah diganti menjadi https://spse.inaproc.id/kkp dengan status tahap tender (tender belum selesai), tender ulang atau tender gagal			
	3.1	Paket 1				Alamat link LPSE yang memuat informasi tahap tender, tender gagal atau tender ulang (Bagi yang tidak ada tender lampirkan surat pernyataan TTD Ses Eselon I/Kepala UPT)
	3.2	Paket 2				Alamat link LPSE yang memuat informasi tahap tender, tender gagal atau tender ulang (Bagi yang tidak ada tender lampirkan surat pernyataan TTD Ses Eselon I/Kepala UPT)

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

E	INFORMASI TERKAIT DAFTAR INFORMASI PUBLIK SESUAI FUNGSI UTAMA UNIT ORGANISASI ESELON I DAN UPT	TERSEDIA		BUKTI PELAKSANAAN	LINK DOKUMEN
		Ya	Tidak		
	1			alamat link website PPID (SK DIP yang ditanda tangani pejabat Eselon I atau PPID Pelaksana)	

INFORMASI DIKECUALIKAN

F	INFORMASI DIKECUALIKAN SESUAI FUNGSI UTAMA UNIT ORGANISASI ESELON I/UPT	TERSEDIA		BUKTI PELAKSANAAN	LINK DOKUMEN
		Ya	Tidak		
	1			Link website PPID yang memuat SK Daftar Informasi Yang Dikecualikan (DIK) hasil Uji Konsekuensi yang ditanda tangani Eselon 1 nya (bukan SK DIK yang dibuatkan oleh Kementerian atau UPT)	

**KUESIONER MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2026**

MENYEDIAKAN DOKUMEN INFORMASI

INFORMASI TERSEDIA SETIAP SAAT & PENGADAAN BARANG DAN JASA						
Menyediakan Dokumen (digital dan atau hardcopy) Informasi Tersedia Setiap Saat			KETERSEDIAAN		BUKTI PELAKSANAAN	LINK DOKUMEN
			Tersedia	Tidak Tersedia		
II	MENYEDIAKAN DOKUMEN INFORMASI					
A	Menyediakan Dokumen informasi yang wajib disediakan dan atau diumumkan Tahun 2026 program dan kegiatan meliputi:					
1	Dokumen program-program atau kegiatan Tahun 2026 Unit Organisasi Eselon 1/UPT sesuai dengan tugas dan fungsi yang sekurang-kurangnya memuat nama program/kegiatan, sumber anggaran, besaran anggaran.				Upload Link dan Soft Copy dalam Link Repositori (Renja 2026)	
2	Dokumen laporan keuangan hasil audit Tahun 2025 lengkap terdiri dari CALK, LRA, Neraca dan Daftar Aset dan Investasi		Ya		Upload Link dan Soft Copy dalam Repositori	
3	Dokumen keuangan tahun 2026 dalam bentuk DIPA dan RKA-KL		Ya		Upload Link dan Soft Copy dalam Repositori	
4	Menyediakan dokumen pengadaan barang dan jasa yang telah diumumkan, rencana, selesai tender atau penunjukan langsung dan telah serah terima pekerjaan Tahun 2026, meliputi:		Ya		Upload Link dan Soft Copy dalam Repositori (Jika tidak ada lampirkan surat pernyataan TTD Ses Eselon I/Kepala UPT)	
Catatan : Jumlah Dokumen yang disediakan sesuai jumlah paket PBJ yang telah selesai. Misal, Dokumen KAK, maka yang disediakan 2 dokumen KAK sesuai Paket						
4.1	Kerangka Acuan Kerja (KAK);				Upload Link dan Soft Copy dalam Repositori (Jika tidak ada tidak di persyaratkan)	
4.2	Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS;				Upload Link dan Soft Copy dalam Repositori (Jika tidak ada tidak di persyaratkan)	
4.3	Spesifikasi Teknis;				Upload Link dan Soft Copy dalam Repositori (Jika tidak ada tidak di persyaratkan)	
4.4	Rancangan Kontrak;				Upload Link dan Soft Copy dalam Repositori (Jika tidak ada tidak di persyaratkan)	
4.5	Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi;				Upload Link dan Soft Copy dalam Repositori (Jika tidak ada tidak di persyaratkan)	

4.6	Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan;			Upload Link dan Soft Copy dalam Repositori (Jika tidak ada tidak di persyaratkan)	
4.7	Daftar Kuantitas dan Harga;			Upload Link dan Soft Copy dalam Repositori (Jika tidak ada tidak di persyaratkan)	
4.8	Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan;			Upload Link dan Soft Copy dalam Repositori (Jika tidak ada tidak di persyaratkan)	
4.9	Gambar Rancangan Pekerjaan;			Upload Link dan Soft Copy dalam Repositori (Jika tidak ada tidak di persyaratkan)	
4.10	Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;			Upload Link dan Soft Copy dalam Repositori (Jika tidak ada tidak di persyaratkan)	
4.11	Dokumen Penawaran Administratif;			Upload Link dan Soft Copy dalam Repositori (Jika tidak ada tidak di persyaratkan)	
4.12	Surat Penawaran Penyedia;			Upload Link dan Soft Copy dalam Repositori (Jika tidak ada tidak di persyaratkan)	
4.13	Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;			Upload Link dan Soft Copy dalam Repositori (Jika tidak ada tidak di persyaratkan)	
4.14	Berita Acara Pemberian Penjelasan;			Upload Link dan Soft Copy dalam Repositori (Jika tidak ada tidak di persyaratkan)	
4.15	Berita Acara Pengumuman Negosiasi;			Upload Link dan Soft Copy dalam Repositori (Jika tidak ada tidak di persyaratkan)	
4.16	Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding;			Upload Link dan Soft Copy dalam Repositori (Jika tidak ada tidak di persyaratkan)	
4.17	Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia;			Upload Link dan Soft Copy dalam Repositori (Jika tidak ada tidak di persyaratkan)	
4.18	Laporan Hasil Pemilihan Penyedia;			Upload Link dan Soft Copy dalam Repositori (Jika tidak ada tidak di persyaratkan)	

4.19	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);			Upload Link dan Soft Copy dalam Repositori (Jika tidak ada tidak di persyaratkan)	
4.20	Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta Perubahan Kontrak yang tidak mengandung informasi yang dikecualikan ;			Upload Link dan Soft Copy dalam Repositori (Jika tidak ada tidak di persyaratkan)	
4.21	Surat Perintah Mulai Kerja;			Upload Link dan Soft Copy dalam Repositori (Jika tidak ada tidak di persyaratkan)	
4.22	Surat Jaminan Pelaksanaan;			Upload Link dan Soft Copy dalam Repositori (Jika tidak ada tidak di persyaratkan)	
4.23	Surat Jaminan Uang Muka;			Upload Link dan Soft Copy dalam Repositori (Jika tidak ada tidak di persyaratkan)	
4.24	Surat Jaminan Pemeliharaan;			Upload Link dan Soft Copy dalam Repositori (Jika tidak ada tidak di persyaratkan)	
4.25	Surat Tagihan;			Upload Link dan Soft Copy dalam Repositori (Jika tidak ada tidak di persyaratkan)	
4.26	Surat Pesanan E-purchasing;			Upload Link dan Soft Copy dalam Repositori (Jika tidak ada tidak di persyaratkan)	
4.27	Surat Perintah Membayar;			Upload Link dan Soft Copy dalam Repositori (Jika tidak ada tidak di persyaratkan)	
4.28	Surat Perintah Pencairan Dana;			Upload Link dan Soft Copy dalam Repositori (Jika tidak ada tidak di persyaratkan)	
4.29	Laporan Pelaksanaan Pekerjaan;			Upload Link dan Soft Copy dalam Repositori (Jika tidak ada tidak di persyaratkan)	
4.30	Laporan Penyelesaian Pekerjaan;			Upload Link dan Soft Copy dalam Repositori (Jika tidak ada tidak di persyaratkan)	
4.31	Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;			Upload Link dan Soft Copy dalam Repositori (Jika tidak ada tidak di persyaratkan)	

KUESIONER MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2026
SARANA PRASARANA

		ELEKTRONIK			
III	SARANA PRASARANA	Ya	Tidak	Bukti Pelaksanaan	LINK DOKUMEN
A	Menu PPID terintegrasi dengan website utama menyediakan informasi:				
	1	Informasi Wajib Berkala yang diperbaharui minimal 6 bulan sekali sesuai PermenKP No.42 Tahun 2023, meliputi:		Ya	upload link website PPID yang menyajikan informasi tersedia setiap saat (digital) lengkap sesuai PermenKP No.42 Tahun 2023 tentang PLIP.
	1.1	Informasi tentang profil Unit Organisasi;		Ya	
	1.2	Ringkasan Informasi tentang program dan kegiatan sedang dijalankan;		Ya	
	1.3	Ringkasan Informasi tentang kinerja capaian dalam lingkup Unit organisasinya;		Ya	
	1.4	Ringkasan laporan keuangan telah diaudit;		Ya	
	1.5	Ringkasan laporan akses Informasi Publik;		Ya	
	1.6	Informasi tentang peraturan, keputusan, kebijakan;		Ya	
	1.7	Informasi tentang prosedur memperoleh Informasi Publik;		Ya	
	1.8	Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan pejabat jajaran di organisasi;		Ya	
	1.9	Informasi tentang pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;		Ya	
	1.10	Informasi tentang kepegawaian; dan		Ya	
	1.11	Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di lingkungan unit organisasinya.		Ya	
	2	Informasi Tersedia Setiap Saat sesuai PermenKP No.42 Tahun 2023 Tahun 2026, meliputi:			upload link website PPID yang menyajikan informasi tersedia setiap saat (digital) lengkap sesuai PermenKP No.42 Tahun 2023 tentang PLIP.
	2.1	SK Daftar Informasi Publik;		Ya	
	2.2	Informasi tentang peraturan, keputusan, dan kebijakan Unit organisasinya;		Ya	
	2.3	Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan;		Ya	
	2.4	Dokumen perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;		Ya	
	2.5	Surat menyurat pimpinan atau pejabat Kementerian dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya;		Ya	
	2.6	Persyaratan perizinan, perizinan yang diterbitkan oleh unit organisasinya;		Ya	
	2.7	Data perbendaharaan atau inventaris;		Ya	
	2.8	Rencana strategis dan rencana kerja unit organisasinya;		Ya	
	2.9	Agenda kerja pimpinan satuan kerja;		Ya	
	2.10	Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik;		Ya	
	2.11	Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran; yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya;		Ya	
	2.12	Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya		Ya	
	2.13	Peraturan perundang-undangan yang telah disahkan beserta kajian akademik;		Ya	
	2.14	Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat unit organisasinya dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;		Ya	

	2.15	Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan masa berlaku atau uji konsekuensi;	Ya			
	2.16	Informasi tentang standar layanan Informasi.	Ya			
3	Informasi Serta Merta, sesuai PermenKP No.42 Tahun 2023, meliputi:				upload link website PPID yang menyajikan informasi tersedia setiap saat (digital) lengkap sesuai PermenKP No.42 Tahun 2023 tentang PLIP.	
	3.1	Informasi bencana alam;	Ya			
	3.2	Informasi jenis ikan invasif yang mengancam keberadaan ikan lokal;	Ya			
	3.3	Informasi daerah wabah penyakit ikan.	Ya			
	3.4	Isu global yang mempengaruhi kebijakan di bidang kelautan dan perikanan (contoh: kebijakan tarif, produk kelautan dan perikanan yang di dilarang keluar atau masuk dari dan ke negara lain, produk kelautan dan perikanan yang berbahaya)	Ya			
4	Daftar Informasi Dikecualikan	Ya		upload link website PPID yang menyajikan informasi wajib (digital) berkala lengkap sesuai Perki 1/2021 tentang SLIP. Ketidaktuntutan mengurangi nilai		
5	Daftar Informasi Publik online	Ya		upload link website PPID yang menyajikan informasi wajib (digital) berkala lengkap sesuai Perki 1/2021 tentang SLIP. Ketidaktuntutan mengurangi nilai		
6	Permintaan informasi online (bukan mengunduh formulir permohonan)	Ya		upload link website permohonan secara digital (ppid.kkp.go.id), tangkapan layar aplikasinya dan dibuatkan surat pernyataan di tanda tangan oleh atasan ppid (apabila tidak ada permohonan)		
7	Pengajuan keberatan online (bukan mengunduh formulir pengajuan keberatan)	Ya		upload link website permohonan secara digital (ppid.kkp.go.id), tangkapan layar aplikasinya dan dibuatkan surat pernyataan di tanda tangan oleh atasan ppid (apabila tidak ada permohonan)		
8	Menyediakan audio visual yang menayangkan layanan informasi publik/papan informasi elektronik/lainnya	Ya		upload link website, tangkapan layar di upload di link G-Drive (youtube, instagram, kanal lain) Tv di ruang layanan menyampaikan terkait ppid)		

NON ELEKTRONIK						
B	Meja Layanan Informasi	Ya	Tidak	Bukti Pelaksanaan	LINK DOKUMEN	
1	Ruang Layanan Informasi/PPID	Ya		Link Repositori (Video Ruang layanan informasi/PPID dimulai dari Tampak depan sampai ruang layanan)		
2	Formulir Permintaan Informasi dan pengajuan keberatan informasi	Ya		Link Repositori (Foto Formulir permohonan dan keberatan)		
3	Sarana Pendukung Lainnya	Ya		Link Repositori (foto Standing Banner, komputer dan lainnya)		
4	Maklumat Pelayanan yang sudah dimutakhirkan (Tahun 2026) (Terbaru dan ditandatangani)	Ya		Link Repositori (Foto Posisi Maklumat)		
5	Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2026	Ya		Link Repositori (Dokumen SKM dan Hasil SKM dipublikasi di medsos, diruang ppid, website, apabila tidak ada survey dibuatkan surat pernyataan yang ditandatangani atasan PPID)		
6	SOP layanan Keterbukaan Informasi Publik pada PPID Pelaksana Pusat, maupun di PPID Pelaksana UPT Yang Dipajang di Ruang PPID, meliputi:			Link Repositori SOP (Non Elektronik) (dipajang kemudian difoto)		
	6.1	SOP Permintaan IP Online/Offline;	Ya			
	6.2	SOP Pengajuan Keberatan;	Ya			
7	SOP layanan Keterbukaan Informasi Publik pada PPID Pelaksana Pusat, maupun di PPID Pelaksana UPT yang tersedia di Ruang PPID meliputi:			Link Repositori SOP (Non Elektronik)		

	7.1	SOP Pendokumentasian informasi publik:	Ya			
	7.2	SOP Pengujian Konsekuensi:	Ya			
	7.3	SOP Penetapan dan Pemutakhiran Informasi Publik.	Ya			
	8	Kecakapan petugas Layanan Informasi Publik	Ya		Link Repositori (Video Petugas saat melayani Surat Tugas Sertifikat atau Piagam Penghargaan)	
C	Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas		Ya	Tidak	Bukti Pelaksanaan	LINK DOKUMEN
	1	Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Online (elektronik/digital)			Link Repositori (video fasilitas-nya) - website PPID dan aplikasi lainnya	
	2	Aksesibilitas Penyandang Disabilitas - Offline			Link Repositori (video fasilitas-nya)	

**KUESIONER MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2026**

KELEMBAGAAN

PROFIL KELEMBAGAAN PPID					
IV	KELEMBAGAAN	TERSEDIA		BUKTI PELAKSANAAN	LINK DOKUMEN
		Ya	Tidak		
A	Legalitas PPID Pelaksanan (Pusat/UPT)				
	1 Sesuai PermenKP No.42 Tahun 2023: Menyediakan dan mengumumkan informasi profil PPID yang meliputi:	Ya		Link website sesuai materi yang ditanyakan (Profil, Struktur Kelembagaan, visi Misi, SK Petugas PPID, Maklumat). Ketidaklengkapan menghilangkan nilai Keseluruhan nomor ini.	
	1.1 Informasi domisili/alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi;				
	1.2 Sumber Anggaran;				
	1.3 LHKPN yang diverifikasi.				
	1.4 Profil singkat pejabat				
	1.5 Struktur Kelembagaan,				
	1.6 visi Misi				
	1.7 SK Petugas PPID				
	1.8 Maklumat	Ya		Ketidaklengkapan akan menghilangkan nilai nomor ini.	
	2 Menyediakan dan mengumumkan standar pelayanan informasi publik yang terdiri dari:			tidak harus setiap tahun dimutakhirkan, kecuali jika ada perubahan organisasi	
	2.1 SOP Permintaan Informasi Publik Online/Offline	Ya		Link website PPID	
	2.2 SOP Pengajuan Keberatan			Link website PPID	
	2.3 SOP Uji Konsekuensi (Daftar Informasi Dikecualikan-DIK)			Link website PPID	
	2.4 SOP Penetapan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP)			Link website PPID	
	2.5 SOP Pendokumentasian informasi publik			Link website PPID	

B	Kepemimpinan	TERSEDIA		BUKTI PELAKSANAAN	LINK DOKUMEN
		Ya	Tidak		
	1 Menetapkan kebijakan pembinaan pelayanan informasi publik	Ya		Link repositori dokumen Perjanjian kinerja dan SK Tim atau surat tugas Tim PPID	
	2 Menetapkan penandatanganan komitmen bersama dengan jajaran PPID Pelaksana UPT bagi PPID Pelaksana Pusat, dan Penandatanganan Komitmen Bersama Internal bagi PPID Pelaksana UPT.	Ya		Link Repositori Dokumen Komitmen Bersama	
	3 Melakukan Peningkatan kapasitas Petugas layanan Informasi Publik di Unit Organisasi PPID Pelaksana Pusat maupun UPT	Ya		Link Repositori Dokumen peningkatan kapasitas. (Bukti sertifikat keikutsertaan 2025 sampai 2026 terkait layanan informasi dan/atau pelayanan publik (misal Pelatihan, bimtek, seminar)	
	4 Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pembinaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana UPT dan/ atau Tim/ Petugas Layanan Informasi Publik	Ya		Untuk PPID Eselon 1 Pusat : Link Repositori Surat menyurat dan Laporan Pelaksanaan Monev Internal di lingkup Unit Eselon 1 (Catatan pada poin B.4 (tidak ada upt) contoh Ses Itjen agar melakukan rapat monev internal pelayanan PPID) Untuk PPID UPT : Laporan Pelaksanaan Monev Internal secara berkala Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2025/ Semester	

C	Dukungan Anggaran	TERSEDIA	BUKTI PELAKSANAAN	LINK DOKUMEN
---	-------------------	----------	-------------------	--------------

C Dukungan Anggaran		Ya	Tidak	BUKTI PELAKSANAAN	LINK DOKUMEN
1	Menyediakan anggaran untuk kegiatan Layanan keterbukaan informasi	Ya		Menunjukkan dokumen anggaran dengan nomenklatur kegiatannya (upload link)	

**KUESIONER MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

TAHUN 2026

DIGITALISASI

MEDIA SOSIAL									
V	INFORMASI DIKECUALIKAN SESUAI FUNGSI UTAMA UNIT ORGANISASI ESELON 1/UPT				TERSEDIA		BUKTI PELAKSANAAN	LINK DOKUMEN	
					Ya	Tidak			
	A	Penyampaian informasi publik melalui media sosial (facebook, instagram, x, tiktok)							
		1	Mengumumkan Informasi berkaitan ruang lingkup, tugas dan fungsi Unit organisasi Eselon I bagi PPID Pelaksana Pusat, dan Ruang lingkup, tugas dan fungsi internal UPT bagi PPID Pelaksana UPT.			Ya		Link MEDSOS Unit organisasi PPID Pelaksana Pusat atau UPT dan disertai Capture/SS (minimal 3 medsos)	
		2	Mengumumkan Informasi program dan kegiatan 2026 Unit organisasi Eselon I dalam Medsos PPID Pelaksana Pusat dan UPT			Ya		Link MEDSOS Unit organisasi PPID Pelaksana Pusat atau UPT dan disertai Capture/SS (minimal 3 medsos)	
		3	Mengumumkan informasi DIPA atau RKA K/L Tahun Anggaran 2026			Ya		Link MEDSOS Unit organisasi PPID Pelaksana Pusat atau UPT dan disertai Capture/SS (minimal 3 medsos)	
		4	Mengumumkan alur Permintaan Informasi Publik sesuai mekanisme di PPID Pelaksana Pusat maupun UPT.			Ya		Link MEDSOS Unit organisasi PPID Pelaksana Pusat atau UPT dan disertai Capture/SS (minimal 3 medsos)	
		5	Mengumumkan Informasi berkaitan alasan yang dapat digunakan Pemohon Informasi mengajukan keberatan (Sesuai PermenKP No.42 Tahun 2023). Tidak lengkap menghilangkan nilai nomor ini.			Ya		Link MEDSOS Unit organisasi PPID Pelaksana Pusat atau UPT dan disertai Capture/SS (minimal 3 medsos)	

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI									
	B	Pengembangan Layanan Informasi Publik				TERSEDIA		BUKTI PELAKSANAAN	LINK DOKUMEN
						Ya	Tidak		
		1	Pemanfatan teknologi informasi atau inovasi <i>non-digital</i> untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Unit Organisasi PPID Pelaksana Pusat maupun UPT			Ya		link Repositori (Nama aplikasi/inovasi dan ringkasan penjelasan tentang latar belakang, kegunaan, manfaat, hasil sebelum dan sesudah ada aplikasi/inovasi). Sertakan juga link aplikasi/inovasi. (non digital : kampanye, edukasi, program agent perubahan (dokumen dokumen yang terintegrasi)	